

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Dampak Tindakan Perusakan Hutan Pada Hutan Sosial di Nagari Taram, maka di bawah ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hutan Nagari Taram, sebuah program perhutanan sosial yang dimulai pada 2016, berhasil mengelola hutan secara berkelanjutan di bawah pengawasan Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). LPHN, yang terdiri dari 24 perwakilan dari tujuh suku pemangku adat di Nagari Taram, membagi area hutan menjadi empat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan fokus pada pariwisata dan produk unggulan. Dukungan dari Pokja, kelompok kerja yang dibentuk pada 2023 untuk mengoordinasikan perhutanan sosial di Sumatera Barat, semakin mempercepat dan memperkuat pengelolaan hutan ini. Salah satu bentuk keberhasilan program hutan sosial ialah dengan adanya Festival Perhutanan Sosial Nagari Taram. Selain itu, Hutan Nagari Taram juga berperan dalam melestarikan lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi alam, menjadikannya model pengelolaan hutan yang sukses dan berkelanjutan.
2. Tantangan pengelolaan hutan sosial nagari taram berupa kerusakan hutan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas ilegal seperti penebangan liar, penambangan emas dan batu, serta pengambilan getah pinus secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem hutan

dan mengganggu keseimbangan ekosistem juga mengancam sumber daya alam. Perusakan hutan mengakibatkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna, erosi tanah, dan pencemaran air, yang berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk menangani masalah ini, Nagari Taram telah memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku perusakan hutan, termasuk denda dan pemberhentian jabatan. Selain itu, LPHN bersama Kelompok Kerja (Pokja) dibentuk untuk mengelola dan mengawasi hutan secara berkelanjutan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan finansial. Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat lokal, yang diharapkan dapat lebih efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Peran masyarakat dalam menjaga hutan sangat penting dan dapat diwujudkan melalui pembentukan jaringan sosial gerakan anti perusakan hutan serta partisipasi dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan kebijakan yang pro-lingkungan dan penegakan hukum yang tegas. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat tercapai, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah yang dapat diambil oleh Pokja adalah meningkatkan kolaborasi dengan LPHN dan pihak-pihak terkait lainnya. Kerja sama yang baik antara berbagai lembaga ini dapat menghasilkan strategi pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, Pokja juga harus lebih aktif dalam melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pengawasan hutan,

karena partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

- b. Mengajukan penyusunan rencana-rencana praktis oleh LPHN dan Pokja untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan Hutan Sosial Nagari Taram. Rencana ini harus disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada dan menempatkan tindakan pencegahan serta penegakan hukum yang efisien sebagai prioritas utama.

